KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Soal Pemindahan Ibukota: DPR Minta Pemerintah Membuat UU Khusus
Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Soal Pemindahan Ibukota

DPR Minta Pemerintah Membuat UU Khusus

DPR menunggu pemerintah mengajukan usulan pembentukan undang-undang (UU) khusus terkait Ibukota Negara.

ANGGOTA Komisi II DPR Yandri Susanto mengatakan, rencana pemerintah untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke daerah lain, harus melibatkan DPR sebagai representasi perwakilan rakyat. Sebab, pemindahkan harus dimulai dari usulan pembentukan UU khusus, dan hal itu harus dibahas bersama antara pemerintah dan DPR.

"Pemindahan ibukota negara merupakan keputusan yang sangat strategis, berkaitan dengan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, pemindahan juga terkait dengan anggaran yang sangat besar, sehingga harus dimulai dari dasar hukum, yakni undang-undang," ujar Yandri dalam diskusi bertajuk "Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota" di Ruang Wartawan, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Yandri menambahkan, pemindahan ibukota negara tak sekadar membangun gedung-gedung, infrastruktur jalan, maupun fasilitas lainnya. Selain persoalan dasar hukum dan anggaran, banyak dampak runutan dari kebijakan tersebut, di antaranya persoalan ekonomi dan sosial di ibukota baru.

"Kalau kantor kementerian dan lembaga pindah, maka pegawai juga ikut pindah. Pegawai yang pindah ini bukan sekadar masalah anggaran, ada masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang harus diselesaikan. Kalau pemerintah menyebut anggaran pemerindahan ibu kota sebesar Rp 500 triliun, saya pastikan kurang," tegas dia.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN ini juga mempertanyakan, apakah pemindahan ibu kota merupakan kebutuhan mendesa. Sebab, persoalan dan tantangan yang dihadapi negara dan rakyat Indonesia adalah lemahnya perekonomian dan pemerataan kesejahteraan.

"Harusnya, pemerintah fokus dalam memperbaiki perekonomian rakyat dan meningkatkan kesejahteraan, bukan merencanakan pemindahan ibu kota. Apakah presiden sudah merasa tidak nyaman berkantor di Jakarta?" sindirnya.

Senada, anggota DPR Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono mengaku terkejut dengan rencana pemerintah untuk memindahkan ibukota. Sejauh ini, rencana pemerintah memindahkan ibukota ke Pulau Kalimantan tak pernah dibicarakan dan melibatkan DPR. Padahal, rencana pemindahan ibu kota negara telah dipublikasikan di media massa.

"Setelah pemerintah telah membuat kajian, menetapkan titiknya di Provinsi Kalimantan Timur, saya pikir langkah (pemerintah) ini serius. Tapi, kami kaget dan menyayangkan, karena pemerintah tidak pernah melibatkan DPR. Pemindahan ibu kota kan harus didasarkan pada undang-undang khusus yang dibahas bersama oleh pemerintah dan DPR," sesal Bambang di tempat yang sama.

Anggota Fraksi Partai Gerindra ini juga menyesalkan langkah pemerintah yang telah melakukan berbagai kajian pemindahan ibu kota tanpa melibatkan DPR dan lembaga terkait lainnya. Langkah pemerintah yang tidak melibatkan DPR itu dapat mendorong lahirnya hak angket, dan ia optimistis banyak anggota mendukung gagasan tersebut.

"Di DPR, lebih banyak anggota yang tidak setuju pada rencana pemindahan ibu kota daripada yang setuju. Terlebih, pemerintah terlihat serius menjalankan kebijakan tersebut, tapi melupakan keberadaan DPR," tandasnya. ■ ONI